

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesenjangan sosial merupakan fenomena yang kerap terjadi di berbagai wilayah, terutama pada daerah dengan ketimpangan dalam distribusi sumber daya, pembangunan, serta akses terhadap layanan publik. Menurut Sulton Mu'minah (2025) Kesenjangan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kondisi geografis, kebijakan pemerintahan yang kurang berpihak pada pemerataan pembangunan, serta kapasitas ekonomi yang belum merata. Salah satu wilayah yang mengalami permasalahan ini adalah Jampang, yang terletak di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Wilayah ini memiliki karakteristik geografis dan administratif yang kompleks, yang berkontribusi terhadap ketimpangan sosial dan ekonomi yang signifikan.

Dalam kajian politik pembangunan, kesenjangan wilayah tidak hanya dipahami sebagai persoalan teknis pembangunan, tetapi juga sebagai hasil dari proses kebijakan yang bersifat politis. Alokasi sumber daya pembangunan sangat ditentukan oleh keputusan politik, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang melibatkan pertimbangan kekuasaan, kepentingan, serta prioritas elite pemerintahan. Oleh karena itu, ketimpangan yang terjadi di wilayah Jampang dapat dibaca sebagai refleksi dari posisi politik wilayah tersebut dalam struktur pemerintahan Kabupaten Sukabumi.

Beberapa studi mutakhir menunjukkan bahwa wilayah perifer yang secara geografis jauh dari pusat pemerintahan cenderung memiliki daya tawar politik yang lebih lemah dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Kondisi ini berdampak pada rendahnya prioritas anggaran dan keterbatasan representasi kepentingan masyarakat lokal dalam agenda kebijakan daerah (BPS Kabupaten Sukabumi, 2024).

Jampang adalah sebuah wilayah yang terletak di Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Secara administratif, wilayah ini mencakup 19 kecamatan, yaitu Kecamatan Jampang Tengah (Bojong Lopang), Nyalindung, Purabaya, Pabuaran, Lengkong, Sagaranten, Curugkembar, Cidadap, Cidolog,

Tegalbuleud, Surade, Cibitung, Ciracap, Jampang Kulon, Cimanggu, Kalibunder, Waluran, Simpenan, dan Ciemas (Ari Djatmiko, 2013). Wilayah ini sebelumnya merupakan bagian dari Kewadanan pada masa Orde Baru, yang memberikan karakter administratif yang berbeda dibandingkan dengan wilayah lain di Kabupaten Sukabumi.



Gambar 1. Peta Rencana Kabupaten Jampang
Sumber: Pikiran Rakyat Garut (Ai Anisa, 2024).

Secara geografis, Formasi Jampang terdiri dari batuan bancuh, batuan laut dalam, batuan ofiolit, serta lava bantal. Struktur geologi yang terbentuk secara intensif, termasuk adanya patahan dan lipatan, menjadikan daerah ini memiliki topografi yang cukup menantang untuk pembangunan infrastruktur yang merata. Salah satu kawasan penting di sekitar Jampang adalah Ciletuh, yang memiliki geomorfologi berupa lembah berbentuk tapal kuda yang diapit oleh gawir tegak (Katon Sena Ajie Nugraha, 2023).

Berdasarkan hasil observasi dan studi eksploratif sementara di lapangan, masyarakat di wilayah Kabupaten Sukabumi masih menghadapi berbagai bentuk ketertinggalan, terutama dalam infrastruktur dasar, akses layanan publik, dan pemerataan pembangunan. Di banyak wilayah pedesaan, jalan yang rusak dan tidak terawat menghambat mobilitas dan aktivitas ekonomi. Fasilitas umum seperti pasar, halte, atau jembatan pun masih minim, bahkan di beberapa tempat belum tersedia. Akses terhadap air bersih, sanitasi, listrik, dan internet masih terbatas, menyebabkan terganggunya aktivitas harian serta memperlebar kesenjangan digital

dan sosial. Beberapa kecamatan, terutama di daerah pedesaan, juga kesulitan mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan yang memadai, berbeda jauh dengan wilayah yang lebih maju seperti Kecamatan Sukabumi. Ketimpangan ini dipicu oleh keterbatasan anggaran, perbedaan prioritas pembangunan, dan kondisi geografis yang sulit dijangkau. Dampaknya terasa nyata dalam kualitas hidup dan pertumbuhan ekonomi yang tidak merata. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur dasar dan akses layanan publik yang menyeluruh menjadi sangat mendesak untuk mendorong kemajuan yang adil dan merata di seluruh wilayah Sukabumi.

Dalam perspektif politik pemerintahan daerah, keterbatasan infrastruktur dan layanan publik tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan erat dengan bagaimana kebijakan pembangunan dirumuskan dan dijalankan. Akses terhadap infrastruktur merupakan hasil dari proses politik anggaran yang melibatkan pemerintah daerah dan DPRD sebagai aktor utama dalam menentukan prioritas pembangunan. Wilayah yang memiliki keterwakilan politik dan kedekatan dengan pusat kekuasaan daerah cenderung memperoleh perhatian yang lebih besar dalam distribusi pembangunan.

Wilayah Jampang, dengan kondisi geografis yang menantang dan jarak yang jauh dari pusat pemerintahan kabupaten, menghadapi keterbatasan dalam memperjuangkan kepentingannya secara politik. Hal ini menyebabkan aspirasi pembangunan sering kali berhadapan dengan keterbatasan fiskal dan prioritas kebijakan daerah yang lebih mengutamakan wilayah tertentu.

Di wilayah selatan Jampang, jalanan yang rusak parah menghambat mobilitas dan distribusi hasil pertanian, sementara akses terhadap listrik masih menjadi persoalan serius. Pemadaman listrik yang berlangsung sehari-hari, bahkan hingga seminggu, bukan hal yang asing bagi warga. Fasilitas kesehatan pun sangat terbatas satu-satunya rumah sakit di wilayah ini, RSUD Jampangkulon, belum mampu memenuhi kebutuhan karena minimnya peralatan medis, sehingga pasien kerap dirujuk ke Sukabumi Kota. Selain itu, daerah Jampang merupakan penghasil komoditas pertanian yang penting, namun akses air masih menjadi kendala akibat belum tersedianya bendungan sebagai infrastruktur pendukung. Dalam sektor

kemungkinan terjadinya ketimpangan politik, di mana wilayah tertentu lebih dominan dalam memengaruhi arah kebijakan dibandingkan wilayah lainnya.

Kondisi tersebut menempatkan wilayah selatan seperti Jampang pada posisi perifer dalam struktur kekuasaan daerah. Akibatnya, aspirasi pemekaran yang muncul dari wilayah ini tidak hanya harus memenuhi persyaratan administratif, tetapi juga harus bersaing dalam arena politik kebijakan dengan kepentingan wilayah lain di Kabupaten Sukabumi.

Dengan luas wilayah yang sangat besar, rentang kendali pemerintahan menjadi sangat luas dan cenderung tersentralisasi di Palabuhan Ratu sebagai pusat pemerintahan. Hal ini menyebabkan ketidakefisienan dalam pelayanan publik, akses pendidikan, serta berbagai aspek kehidupan sosial lainnya, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah selatan seperti Jampang.

Minimnya fasilitas umum dan sosial di wilayah Jampang seperti yang sebelumnya di bahas di atas, menjadi salah satu indikator utama ketimpangan yang terjadi. Aksesibilitas terhadap pelayanan sarana dan prasarana ekonomi serta sosial masih jauh dari kata ideal. Tidak meratanya pembangunan menyebabkan wilayah ini tertinggal dibandingkan dengan daerah lain di Kabupaten Sukabumi. Salah satu dampak nyata dari kondisi ini adalah tingginya tingkat pengangguran akibat terbatasnya lapangan pekerjaan (Izzan Faruqi, 2015). Selain itu, bidang-bidang penting seperti pendidikan, keagamaan, pembangunan infrastruktur, serta kehidupan sosial juga mengalami keterlambatan dalam perkembangannya. Di antara aspek yang paling krusial adalah pembangunan kehidupan sosial yang berorientasi pada kebangsaan, kenegaraan, serta penguatan ideologi di tengah era globalisasi yang semakin kompleks. Penguatan nilai-nilai demokratis dan kemasyarakatan yang berkeadilan menjadi suatu keharusan dalam mewujudkan masyarakat madani yang adil, demokratis, dan beradab.

Di sisi lain, masyarakat Kabupaten Sukabumi, khususnya yang berada di wilayah selatan seperti Jampang, menghadapi tantangan global yang sangat berat. Tantangan ini meliputi pengaruh ideologi sekularisme yang datang dari luar, sistem politik dan ekonomi yang tidak selalu berpihak pada masyarakat lokal, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berpotensi menggoyahkan

batas etika dan moral. Budaya global yang masuk tanpa filter dapat melunturkan aspek religiusitas masyarakat, terutama karena wilayah Jampang merupakan bagian dari kepulauan terluar Indonesia yang kerap menghadapi pengaruh eksternal yang kuat. Lebih dari itu, kemajemukan serta keberagaman dalam pemikiran keagamaan, organisasi sosial, kecenderungan aliran, serta aspirasi politik dapat menjadi kekuatan, tetapi juga dapat menjadi sumber pertentangan apabila tidak dikelola dengan baik. Hal ini semakin diperparah oleh rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah Jampang.

Dalam konteks kehidupan sosial, kesenjangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan di Kabupaten Sukabumi semakin mempertegas perlunya pemekaran wilayah. Ketimpangan ini berdampak pada peningkatan migrasi penduduk dari daerah perdesaan ke kota-kota besar, yang berimplikasi pada penurunan produktivitas sektor pertanian dan ekonomi lokal. Fenomena ini menunjukkan bahwa keberadaan pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan mempercepat pembangunan daerah. Oleh karena itu, wacana pemekaran Kabupaten Jampang menjadi sebuah solusi yang dapat mengatasi berbagai persoalan struktural yang selama ini dihadapi oleh masyarakat di wilayah tersebut.

Dalam menganalisis fenomena pemekaran Kabupaten Jampang, teori sistem politik yang dikemukakan oleh David Easton memberikan pandangan bahwa pemekaran daerah merupakan bagian dari masukan (input) yang berasal dari tuntutan masyarakat terhadap sistem politik. Dalam konteks ini, masyarakat sebagai aktor politik mengajukan tuntutan berupa pemekaran wilayah sebagai respons terhadap kebutuhan akan pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, serta penguatan identitas lokal. Tuntutan ini kemudian diproses dalam sistem politik melalui mekanisme administratif dan regulatif yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Namun, dalam praktiknya, proses pemekaran ini sering kali menghadapi hambatan yang bersumber dari kompleksitas regulasi, tarik-menarik kepentingan politik, serta keterbatasan kapasitas administratif dan ekonomi daerah yang akan dimekarkan.

Oleh karena itu, pemekaran daerah tidak hanya sekadar persoalan teknis administratif, tetapi juga merupakan hasil dari interaksi dinamis antara berbagai aktor politik dan kelembagaan dalam suatu sistem politik yang lebih luas. Selain itu, teori otonomi daerah juga sangat relevan dalam membahas pemekaran Kabupaten Jampang. Otonomi daerah bertujuan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya dan menentukan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Mengacu pada teori sistem politik Easton, tuntutan pemekaran Kabupaten Jampang dapat diposisikan sebagai input politik yang masuk ke dalam sistem. Input tersebut kemudian diproses melalui mekanisme politik dan kebijakan yang melibatkan aktor-aktor pemerintahan. Namun, tidak semua input menghasilkan output kebijakan yang sesuai dengan tuntutan masyarakat, karena sistem politik memiliki mekanisme seleksi dan penyaringan yang dipengaruhi oleh kepentingan elite, prioritas kebijakan, serta keterbatasan struktural.

Dengan demikian, pemekaran Kabupaten Jampang dapat dikatakan memiliki urgensi secara substantif dari sisi kebutuhan masyarakat dan pembangunan wilayah. Akan tetapi, dalam konteks politik pemerintahan saat ini, pemekaran tersebut belum menjadi prioritas kebijakan utama karena adanya kebijakan moratorium dan pertimbangan politik daerah. Hal inilah yang menjadikan pemekaran Kabupaten Jampang sebagai isu politik yang tetap relevan, namun berada dalam posisi menunggu momentum kebijakan yang lebih kondusif.

Selain itu, teori desentralisasi juga relevan dalam memahami dinamika pemekaran Kabupaten Jampang. Salah satu ahli terkemuka dalam studi desentralisasi yaitu Jean-Paul Faguet dalam (Noval Akhmad Huda, 2013), berpendapat bahwa desentralisasi yang efektif dapat meningkatkan kualitas pemerintahan dengan mendekatkan pengambilan keputusan kepada masyarakat yang terkena dampaknya secara langsung. Faguet menekankan bahwa desentralisasi seharusnya memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk merancang kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan lokal, dengan tetap mempertahankan koordinasi dengan pemerintah pusat. Dalam konteks pemekaran daerah, desentralisasi menjadi instrumen yang memungkinkan

daerah baru memiliki otonomi yang lebih luas dalam mengelola sumber daya dan merancang kebijakan pembangunan yang lebih sesuai dengan kondisi lokal.

Desentralisasi merupakan suatu konsep dalam sistem pemerintahan yang mengacu pada pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau unit administratif yang lebih rendah. Menurut Rondinelli (1983) (dalam Aos Kuswandi, 2011), desentralisasi dapat mencakup berbagai bentuk, mulai dari devolusi kekuasaan kepada pemerintah daerah, delegasi tugas kepada badan-badan semi-otonom, hingga pelimpahan tanggung jawab kepada organisasi non-pemerintah atau komunitas lokal. Dengan adanya desentralisasi, diharapkan pemerintah daerah dapat lebih mandiri dalam mengambil keputusan dan merancang kebijakan yang lebih sesuai dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat setempat. Proses ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan dan mempercepat pembangunan daerah dengan memberikan keleluasaan bagi pemerintah lokal dalam mengelola sumber daya dan kebijakan secara lebih fleksibel.

Salah satu manfaat utama dari desentralisasi adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah setempat dapat lebih memahami dan menyesuaikan kebijakan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakatnya. Desentralisasi juga memungkinkan adanya inovasi kebijakan yang lebih spesifik dan tepat sasaran, karena setiap daerah memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Sebagai contoh, daerah dengan potensi pertanian yang besar dapat mengembangkan kebijakan khusus untuk mendukung petani lokal, sementara daerah yang berbasis industri dapat menitikberatkan pada regulasi yang mendukung investasi dan penciptaan lapangan kerja. Selain itu, dengan kewenangan yang lebih luas, daerah juga dapat membangun infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa harus menunggu keputusan dari pemerintah pusat, yang sering kali bersifat birokratis dan lambat.

Oleh karena itu, Pemekaran daerah merupakan salah satu strategi desentralisasi yang bertujuan untuk mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, serta memberikan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat lokal dalam berpartisipasi dalam pembangunan daerah. Wacana

pemekaran Kabupaten Jampang telah lama menjadi perbincangan di kalangan masyarakat, akademisi, serta aktor politik, namun hingga saat ini belum terwujud karena berbagai hambatan baik dari aspek regulasi, politik, ekonomi, maupun sosial.

Dalam perspektif ilmu politik, pemekaran daerah merupakan bentuk tuntutan politik masyarakat terhadap negara dan pemerintah daerah. Pemekaran tidak hanya dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan, tetapi juga untuk memperoleh pengakuan politik, memperkuat representasi, serta memperpendek jarak antara masyarakat dan pengambil kebijakan. Dengan demikian, tuntutan pemekaran Kabupaten Jampang dapat dipahami sebagai bagian dari upaya masyarakat untuk memperjuangkan hak-hak politik dan pembangunan secara lebih adil.

Namun demikian, tuntutan tersebut tidak selalu berbanding lurus dengan realisasi kebijakan. Proses pemekaran daerah harus melalui mekanisme politik yang panjang, melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta lembaga legislatif. Dalam proses ini, kepentingan masyarakat lokal sering kali harus berhadapan dengan pertimbangan stabilitas politik, fiskal, dan tata kelola pemerintahan secara nasional.

Secara keseluruhan, fenomena kesenjangan sosial di wilayah Jampang disebabkan oleh kombinasi faktor geografis, administratif, dan kurangnya pemerataan dalam pembangunan. Oleh karena itu, guna merealisasikan optimalisasi pembangunan di Kabupaten Sukabumi, gagasan untuk mempertegas pemekaran Jampang sebagai daerah otonomi baru menjadi solusi yang sangat relevan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada.

Salah satu hambatan utama dalam pembentukan Kabupaten Jampang adalah ketidaksepakatan di antara elit politik lokal dan pemerintah pusat mengenai kelayakan administratif serta keberlanjutan fiskal daerah baru (BP2KS, 2019). Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemekaran daerah harus memenuhi berbagai persyaratan, seperti jumlah penduduk, luas wilayah, serta kapasitas ekonomi. Sayangnya, dalam banyak kasus, pemekaran lebih sering dipolitikasi oleh kepentingan kelompok tertentu dibandingkan dengan mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini

berimplikasi pada tertundanya keputusan pemekaran, yang pada akhirnya berdampak pada stagnasi pembangunan di Jampang.

Dari sisi regulasi, kebijakan pemerintah terkait moratorium pemekaran daerah juga menjadi faktor utama yang menghambat realisasi pembentukan Kabupaten Jampang. Pemerintah pusat menerapkan kebijakan moratorium sebagai langkah untuk menekan biaya administrasi negara dan memastikan kesiapan daerah dalam hal ekonomi dan birokrasi. Namun, kebijakan ini sering kali dinilai tidak mempertimbangkan kondisi riil di lapangan, di mana beberapa daerah memang membutuhkan pemekaran untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Moratorium pemekaran daerah yang diberlakukan oleh pemerintah pusat merupakan kebijakan politik strategis yang bertujuan untuk mengendalikan laju pembentukan daerah otonomi baru. Pemerintah pusat menilai bahwa banyak daerah hasil pemekaran sebelumnya belum mampu mandiri secara fiskal dan masih bergantung pada transfer pusat, sehingga pemekaran perlu dikaji secara lebih komprehensif (Kemendagri, 2022).

Media nasional juga mencatat bahwa hingga tahun 2025, moratorium pemekaran daerah belum dicabut dan masih menjadi perdebatan politik antara pemerintah dan DPR. Perdebatan tersebut berkisar pada kesiapan daerah, beban anggaran negara, serta efektivitas pemerintahan daerah hasil pemekaran (Nikolaus Harbowo, 2025).

Dari perspektif ekonomi, pembentukan daerah otonomi baru memerlukan kesiapan fiskal yang memadai. Ketidadaan sumber daya ekonomi yang kuat di Jampang sering kali dijadikan alasan utama oleh pemerintah pusat dalam menolak permohonan pemekaran. Wilayah Jampang masih bergantung pada sektor pertanian dan perikanan, yang dinilai belum cukup kuat untuk menopang perekonomian daerah baru. Padahal, dengan adanya pemekaran, daerah ini berpotensi mengembangkan sektor ekonomi yang lebih beragam dengan adanya kebijakan fiskal dan investasi yang lebih spesifik.

Dengan mempertimbangkan kompleksitas permasalahan yang dihadapi wilayah Jampang, baik dari aspek geografis, sosial, politik, maupun ekonomi, maka

penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna memberikan kontribusi ilmiah dalam merumuskan solusi strategis terhadap ketimpangan pembangunan yang terjadi. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengkaji dinamika kesenjangan sosial dan hambatan pemekaran daerah, tetapi juga untuk mengevaluasi potensi serta kesiapan Jampang menjadi daerah otonomi baru dalam kerangka desentralisasi dan otonomi daerah. Melalui pendekatan analitis terhadap kebijakan, struktur pemerintahan, serta aspirasi masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi dasar pertimbangan yang komprehensif bagi para pembuat kebijakan, baik di tingkat daerah maupun pusat, dalam mewujudkan pemekaran Kabupaten Jampang sebagai upaya nyata mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat daya saing wilayah selatan Sukabumi.

Dengan analisis yang lebih mendalam, penelitian ini juga dapat mengidentifikasi kemungkinan kebijakan yang lebih efektif dalam menangani hambatan pemekaran, baik dari aspek regulasi, kesiapan ekonomi, maupun dinamika politik lokal. Maka, Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji pemekaran Kabupaten Jampang melalui pendekatan dinamika politik dan urgensi politik, dengan judul:

“Dinamika Politik dan Urgensi Pemekaran Kabupaten Jampang di Kabupaten Sukabumi.”

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan akademik dan praktis bagi berbagai pihak yang berkepentingan dalam isu pemekaran daerah di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, penelitian ini diarahkan untuk memahami pemekaran Kabupaten Jampang tidak hanya sebagai isu administratif, tetapi sebagai proses politik yang dipengaruhi oleh relasi kekuasaan, kebijakan, dan kepentingan aktor. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dinamika politik dalam proses pemekaran Kabupaten Jampang di Kabupaten Sukabumi?

2. Bagaimana urgensi politik pemekaran Kabupaten Jampang dalam konteks kebijakan dan prioritas pembangunan daerah saat ini?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dinamika politik yang terjadi dalam proses pemekaran Kabupaten Jampang di Kabupaten Sukabumi, yang melibatkan relasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPRD, serta aktor non-negara seperti presidium pemekaran dan tokoh masyarakat.
2. Untuk mengkaji urgensi politik pemekaran Kabupaten Jampang dalam konteks kebijakan dan prioritas pembangunan daerah saat ini, dengan mempertimbangkan kondisi objektif wilayah, aspirasi masyarakat, serta kebijakan moratorium dan keputusan politik daerah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara akademik maupun praktis, di antaranya:

1. Manfaat Akademis

- Menambah wawasan dalam kajian ilmu politik, khususnya dalam studi desentralisasi dan pemekaran daerah.
- Memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori dalam studi otonomi daerah dan kebijakan publik terkait pemekaran wilayah.

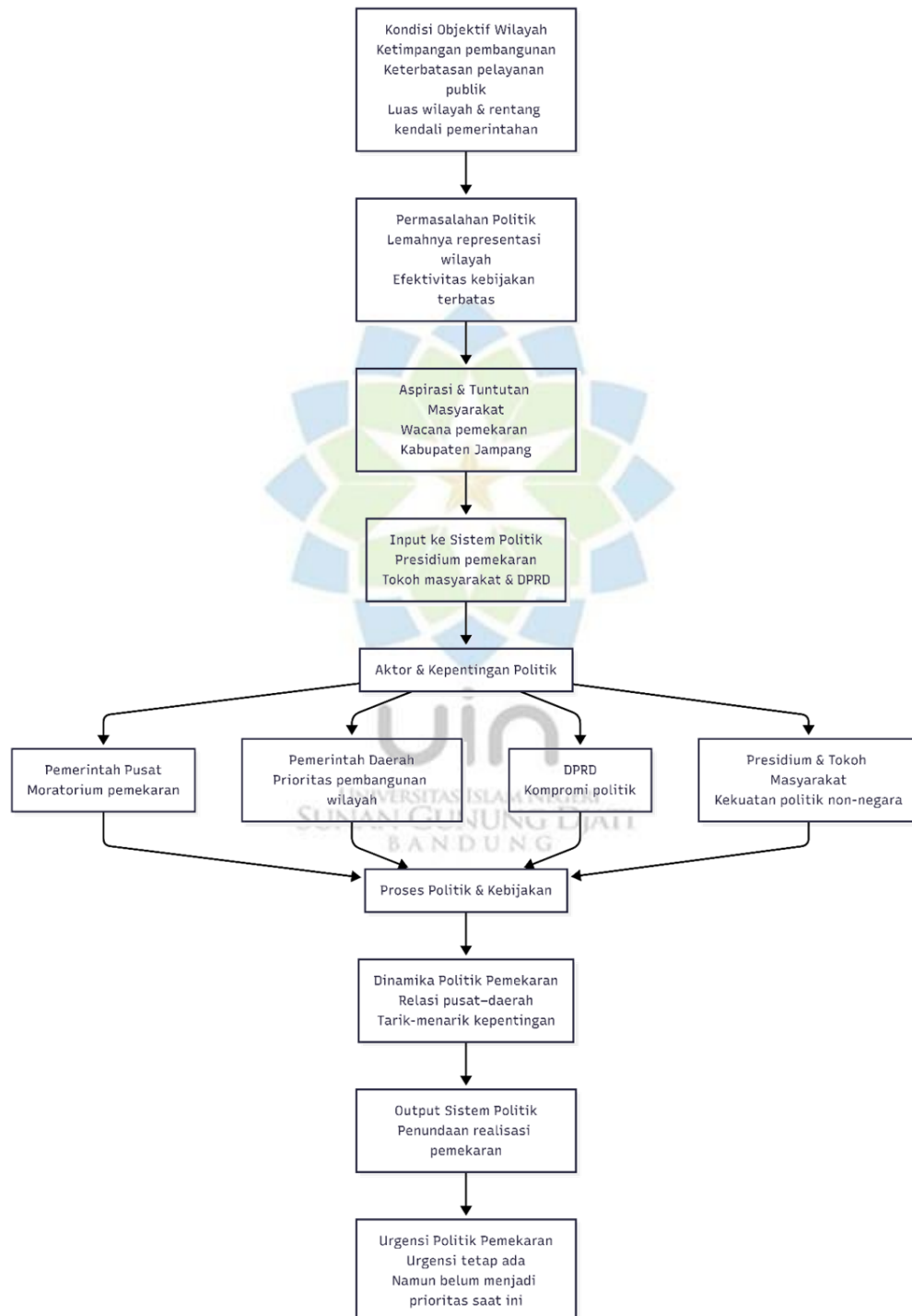
2. Manfaat Praktis

- Menyediakan informasi dan analisis yang dapat digunakan oleh pemangku kebijakan dalam menyusun strategi yang lebih efektif untuk mengatasi ketimpangan sosial di Kabupaten Sukabumi khususnya di wilayah selatan Jampang.
- Menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat dan aktor politik lokal dalam menyuarakan aspirasi terkait pemekaran daerah secara lebih terstruktur dan berbasis data.

E. Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir penelitian ini disusun untuk menjelaskan alur logis dalam menganalisis dinamika politik dan urgensi pemekaran Kabupaten Jampang di

Kabupaten Sukabumi. Alur tersebut dimulai dari kondisi objektif wilayah yang menjadi latar struktural munculnya persoalan politik, hingga pada keluaran kebijakan yang dihasilkan oleh sistem politik.



Tabel 1. Kerangka Pemikiran

Tahap awal kerangka berpikir menunjukkan kondisi objektif wilayah Jampang, yang ditandai oleh ketimpangan pembangunan antarwilayah, keterbatasan pelayanan publik, serta luasnya wilayah dan panjangnya rentang kendali pemerintahan Kabupaten Sukabumi. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada aspek kesejahteraan masyarakat, tetapi juga memengaruhi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan distribusi kebijakan pembangunan di wilayah selatan Kabupaten Sukabumi.

Kondisi objektif tersebut kemudian berkembang menjadi permasalahan politik, terutama berkaitan dengan lemahnya representasi wilayah Jampang dalam struktur pengambilan keputusan serta terbatasnya efektivitas kebijakan publik yang menjangkau masyarakat secara merata. Dalam konteks ini, ketimpangan pembangunan tidak lagi dipandang semata sebagai persoalan administratif, melainkan sebagai persoalan politik yang menyangkut relasi kekuasaan, prioritas kebijakan, dan distribusi sumber daya.

Permasalahan politik tersebut mendorong munculnya aspirasi dan tuntutan masyarakat, yang diwujudkan dalam wacana pemekaran Kabupaten Jampang. Aspirasi ini dipandang sebagai upaya politik masyarakat untuk memperoleh pemerintahan yang lebih dekat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat posisi wilayah Jampang dalam struktur pemerintahan daerah. Aspirasi tersebut selanjutnya disalurkan ke dalam sistem politik sebagai input politik melalui berbagai saluran, seperti presidium pemekaran, tokoh masyarakat, dan DPRD.

Dalam prosesnya, input politik tersebut melibatkan berbagai aktor dan kepentingan politik yang memiliki peran dan perspektif berbeda. Pemerintah pusat berperan melalui kebijakan moratorium pemekaran daerah, pemerintah daerah memiliki kepentingan dalam menentukan prioritas pembangunan wilayah, DPRD menjalankan fungsi representasi dan kompromi politik, sementara presidium pemekaran dan tokoh masyarakat berperan sebagai kekuatan politik non-negara yang menyuarakan aspirasi masyarakat. Interaksi antaraktor ini membentuk arena politik yang dinamis dalam proses pemekaran.

Selanjutnya, interaksi berbagai aktor tersebut bermuara pada proses politik dan kebijakan, yang ditandai oleh negosiasi, kompromi, serta pertimbangan

kebijakan dalam kerangka relasi pusat–daerah dan desentralisasi. Proses ini memperlihatkan adanya tarik-menarik kepentingan serta perbedaan prioritas kebijakan yang memengaruhi arah dan tempo realisasi pemekaran.

Proses politik tersebut menghasilkan dinamika politik pemekaran, yang tercermin dalam hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, perbedaan pandangan di tingkat elite, serta posisi tawar aktor non-negara dalam memengaruhi agenda kebijakan. Dinamika ini kemudian menghasilkan output sistem politik berupa penundaan realisasi pemekaran Kabupaten Jampang sebagai keputusan kebijakan yang bersifat sementara.

Meskipun demikian, pada tahap akhir kerangka berpikir ditegaskan bahwa urgensi politik pemekaran Kabupaten Jampang tetap ada. Urgensi tersebut didasarkan pada kondisi objektif wilayah dan aspirasi masyarakat yang masih relevan. Namun, dalam realitas kebijakan saat ini, pemekaran Kabupaten Jampang belum menjadi prioritas politik pemerintah, sehingga realisasinya masih tertunda.

